



**SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PENANGGULANGAN KEMISKINAN: PENGUATAN KELEMBAGAAN PUSAT DAN DAERAH

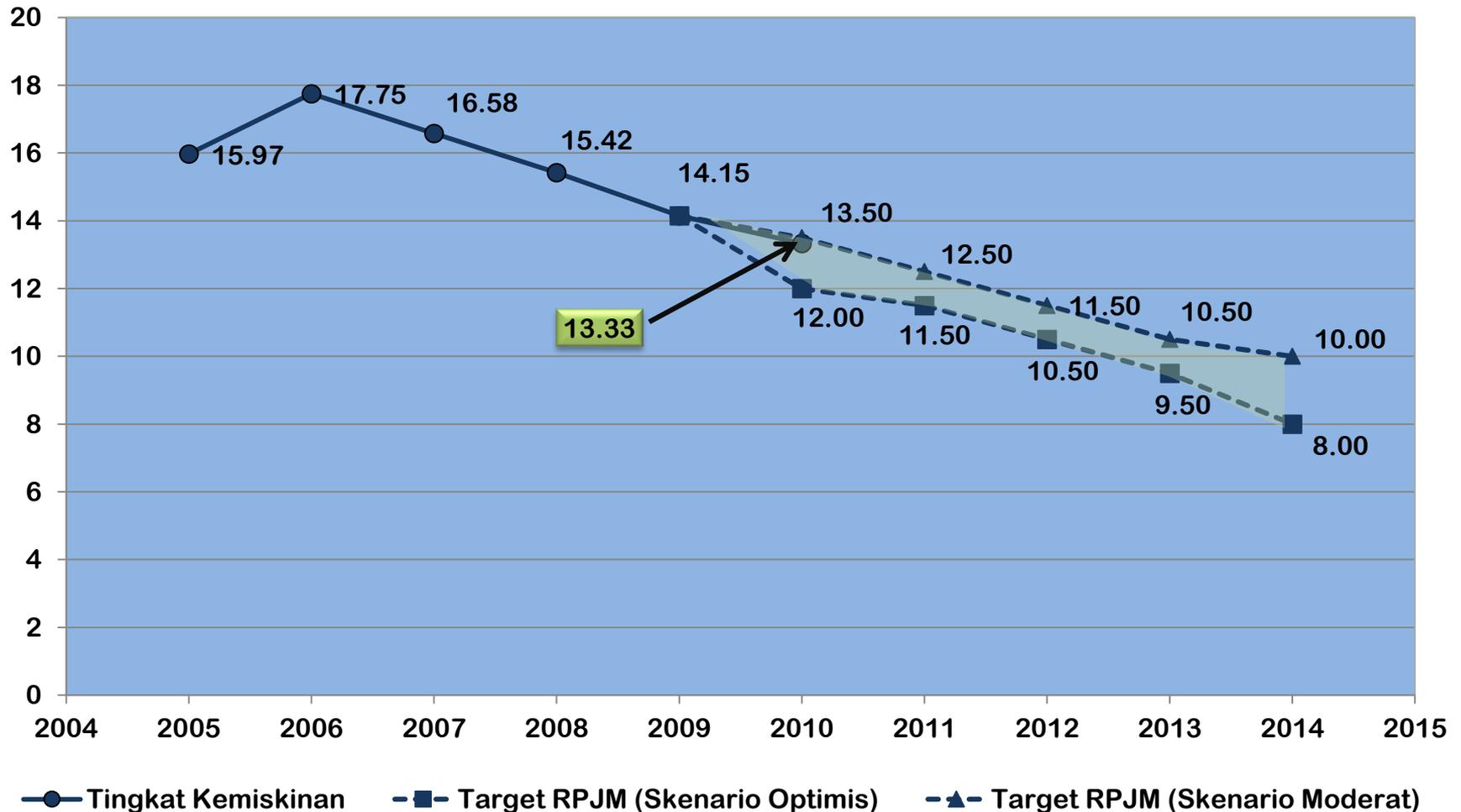
**DISAMPAIKAN OLEH :
DEPUTI SESWAPRES BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN PENANGGULANGAN
KEMISKINAN, SELAKU SEKRETARIS EKSEKUTIF TIM NASIONAL PERCEPATAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TNP2K)**

JAMBI, 1 APRIL 2011

TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

- Dasar Hukum:
 - Peraturan Presiden No. 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- Kebijakan presiden dikeluarkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi SBY-Boediono untuk menurunkan kemiskinan hingga 8-10% pada akhir tahun 2014.

SASARAN TINGKAT KEMISKINAN TERCAPAI



TUGAS TNP2K

TNP2K Bertugas:

- a. Menyusun kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan;
- b. Melakukan sinergi melalui sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi program-program penanggulangan kemiskinan di kementerian/lembaga;
- c. Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

KEANGGOTAAN TNP2K

- Susunan keanggotaan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan:
 - Ketua : Wakil Presiden
 - Wakil Ketua I : Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
 - Wakil Ketua II : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
 - Sekretaris Eksekutif : Deputi Seswapres Bidang Kesejahteraan Rakyat

ANGGOTA TNP2K:

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Keuangan
3. Menteri Sosial
4. Menteri Kesehatan
5. Menteri Pendidikan Nasional
6. Menteri Pekerjaan Umum
7. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
8. Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal
9. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas
10. Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (Kepala UKP4)
11. Sekretaris Kabinet
12. Kepala Badan Pusat Statistik
13. Masyarakat, Dunia Usaha, dan Pemangku Kepentingan yang Ditetapkan oleh Ketua

TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

KETUA : Wakil Presiden Republik Indonesia
WAKIL KETUA 1 : Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
WAKIL KETUA 2 : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

ANGGOTA

TIM PEMBIAYAAN
KETUA: MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN/
KEPALA BAPPENAS

SEKRETARIS EKSEKUTIF :
DEPUTI SESWAPRES
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN



Kelompok Kerja Pengendali
Bantuan Sosial Terpadu Berbasis
Keluarga

Kedeputan Seswapres Bidang
Kesejahteraan Rakyat dan Penanggulangan
Kemiskinan

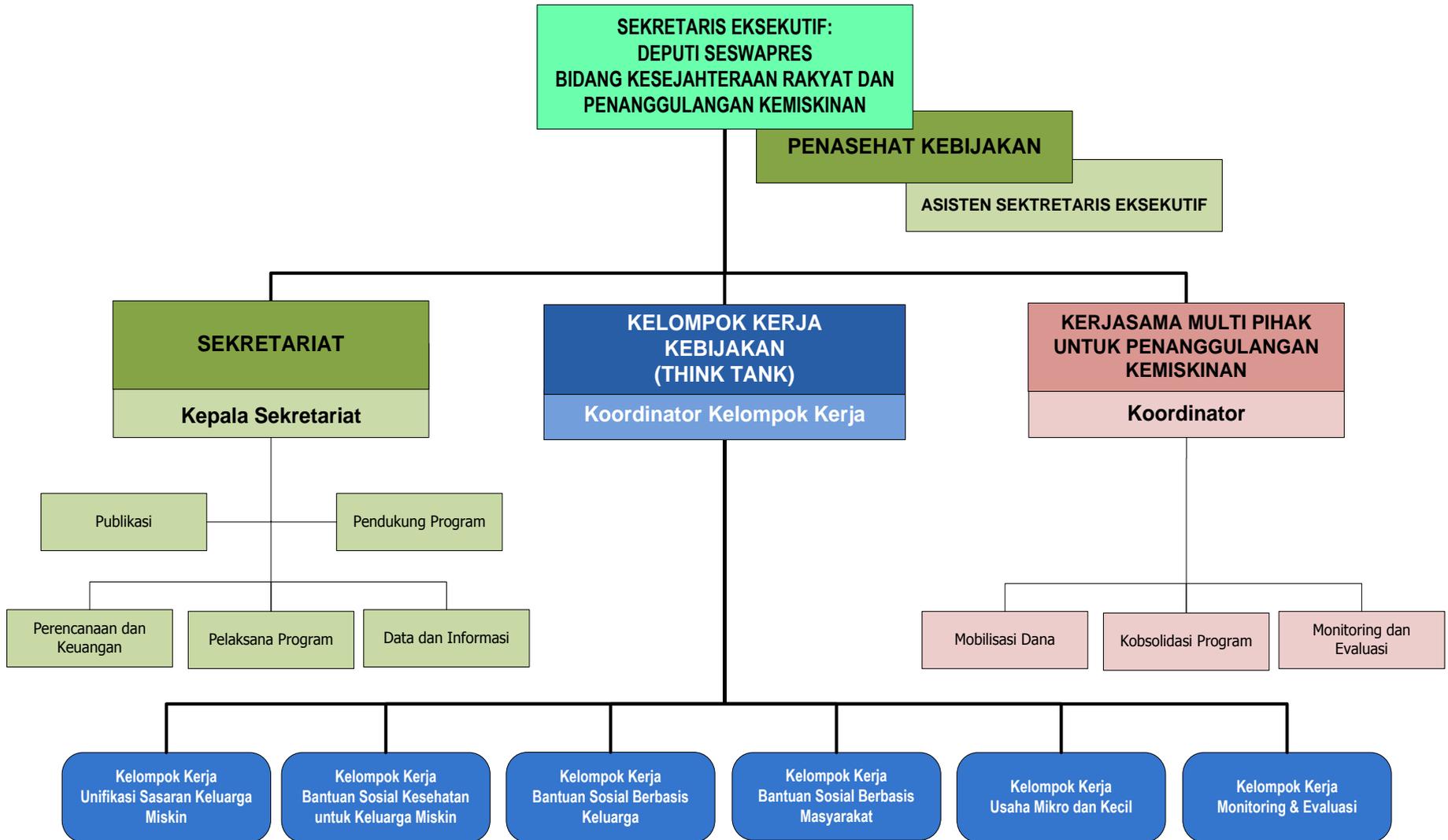
Kelompok Kerja Pengendali
Program Penanggulangan Kemiskinan
Berbasis Pemberdayaan Masyarakat
(PNPM Mandiri)

Kementerian Koordinator Bidang
Kesejahteraan Rakyat

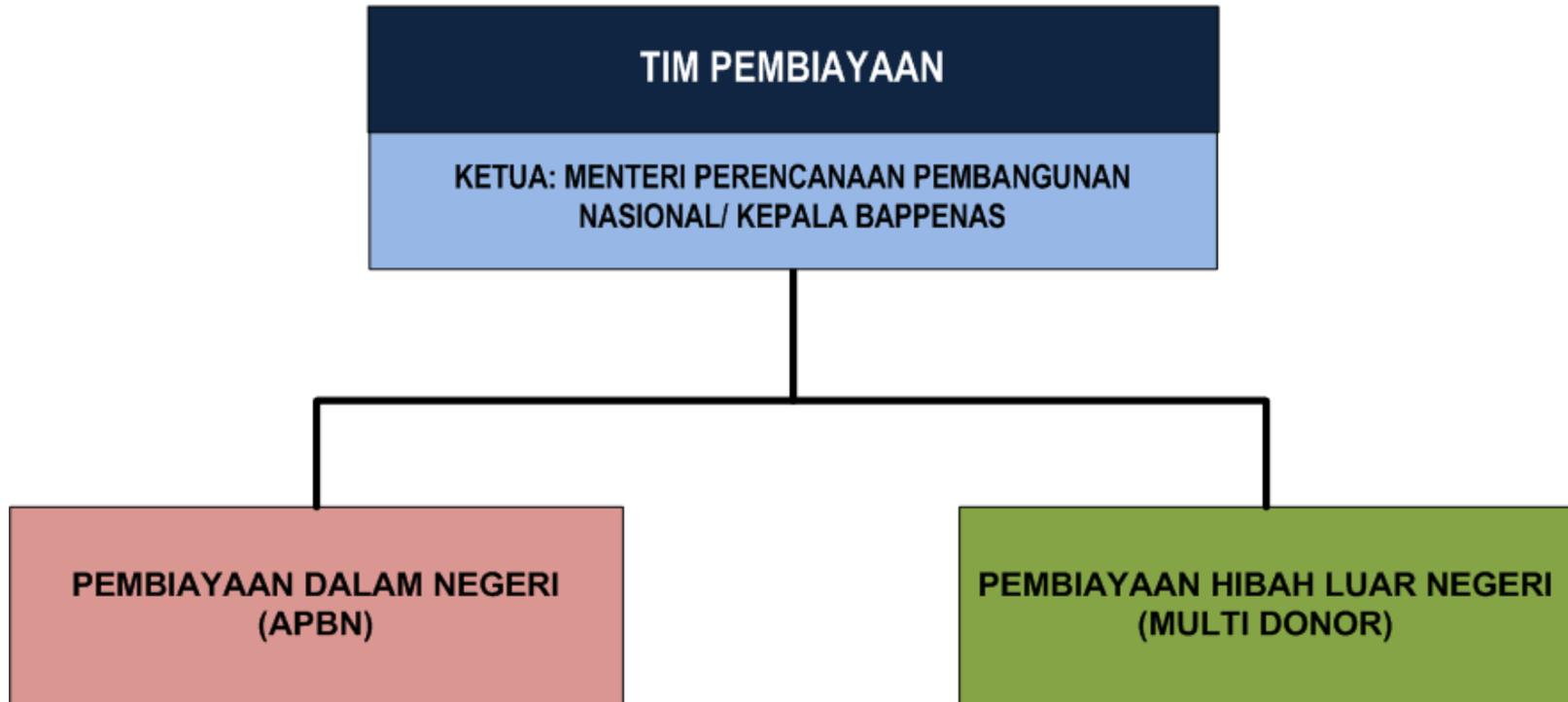
Kelompok Kerja Pengendali
Program Penanggulangan Kemiskinan
Berbasis Pemberdayaan Usaha Mikro dan
Kecil

Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian

SEKRETARIAT TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN



TIM PEMBIAYAAN



PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Periode maret 2009 – maret 2010:

14,7 juta orang keluar dari kemiskinan, 13.2 juta masuk kembali ke bawah garis kemiskinan, net 1,5 juta orang keluar dari kemiskinan

I. MENYEMPURNAKAN PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL

- Bantuan Sosial Berbasis Keluarga
- Bantuan Kesehatan bagi Keluarga Miskin
- Bantuan Pendidikan bagi Masyarakat Miskin

II. MENINGKATKAN AKSES RUMAH TANGGA MISKIN TERHADAP PELAYANAN DASAR: PENDIDIKAN, KESEHATAN DASAR SEPERTI SANITASI DAN AIR BERSIH

III. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

- Menyempurnakan Pelaksanaan PNPM Mandiri

IV. PERTUMBUHAN EKONOMI BERKUALITAS: Inclusive Growth

- UMKM
- Industri Manufaktur Padat Pekerja
- Konektivitas Ekonomi
- Iklim Usaha
- Pasar Kerja yg Luwes
- Infrastruktur
- Pembangunan Perdesaan
- Pembangunan Pertanian
- ☐ Infrastruktur

INSTRUMEN UTAMA

1. Program Penanggulangan Kemiskinan yang Sasarannya Individu atau Rumah Tangga (Klaster I).
2. Program Penanggulangan Kemiskinan yang Sasarannya Komunitas (Klaster II).
3. Program Penanggulangan Kemiskinan yang Sasarannya Usaha Mikro dan Kecil (Klaster III).

PRIORITAS JANGKA PENDEK - MENENGAH

1. Unifikasi Sistem Penargetan Nasional
2. Menyempurnakan Pelaksanaan Bantuan Sosial Kesehatan untuk Keluarga Miskin
3. Menyempurnakan Pelaksanaan dan Memperluas Cakupan Program Keluarga Harapan
4. Integrasi Program Pemberdayaan Masyarakat Lainnya ke dalam PNPM

DIMONITOR MELALUI INPRES NO. 1 TAHUN 2010 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2010 DAN INPRES NO. 3 TAHUN 2010 TENTANG PROGRAM PEMBANGUNAN YANG BERKEADILAN

DASAR HUKUM TKPK DAERAH

- Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 42 Tahun 2010 Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota

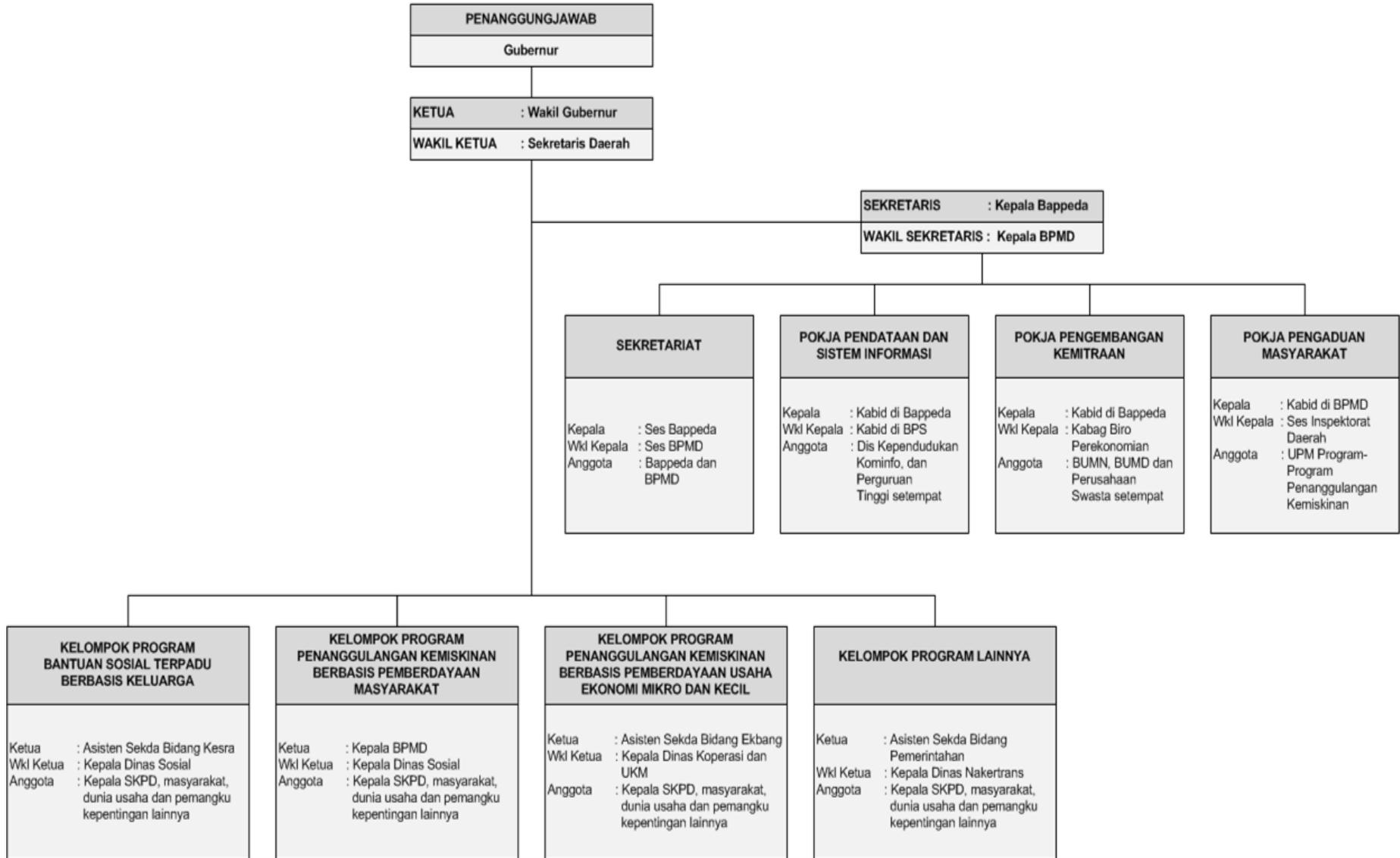
KELEMBAGAAN TKPK PROVINSI

Berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

- Ketua TKPK Provinsi: **Wakil Gubernur** yang ditetapkan oleh Gubernur.
- Sekretaris TKPK Provinsi: **Kepala Bappeda Provinsi** yang ditetapkan oleh Gubernur.
- Keanggotaan TKPK Provinsi terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan.
- Penetapan tugas, susunan keanggotaan, kelompok kerja, sekretariat, dan pendanaan TKPK Provinsi diatur dengan Surat Keputusan Gubernur dengan memperhatikan Perpres 15/2010.

STRUKTUR ORGANISASI

TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TKPK) PROVINSI



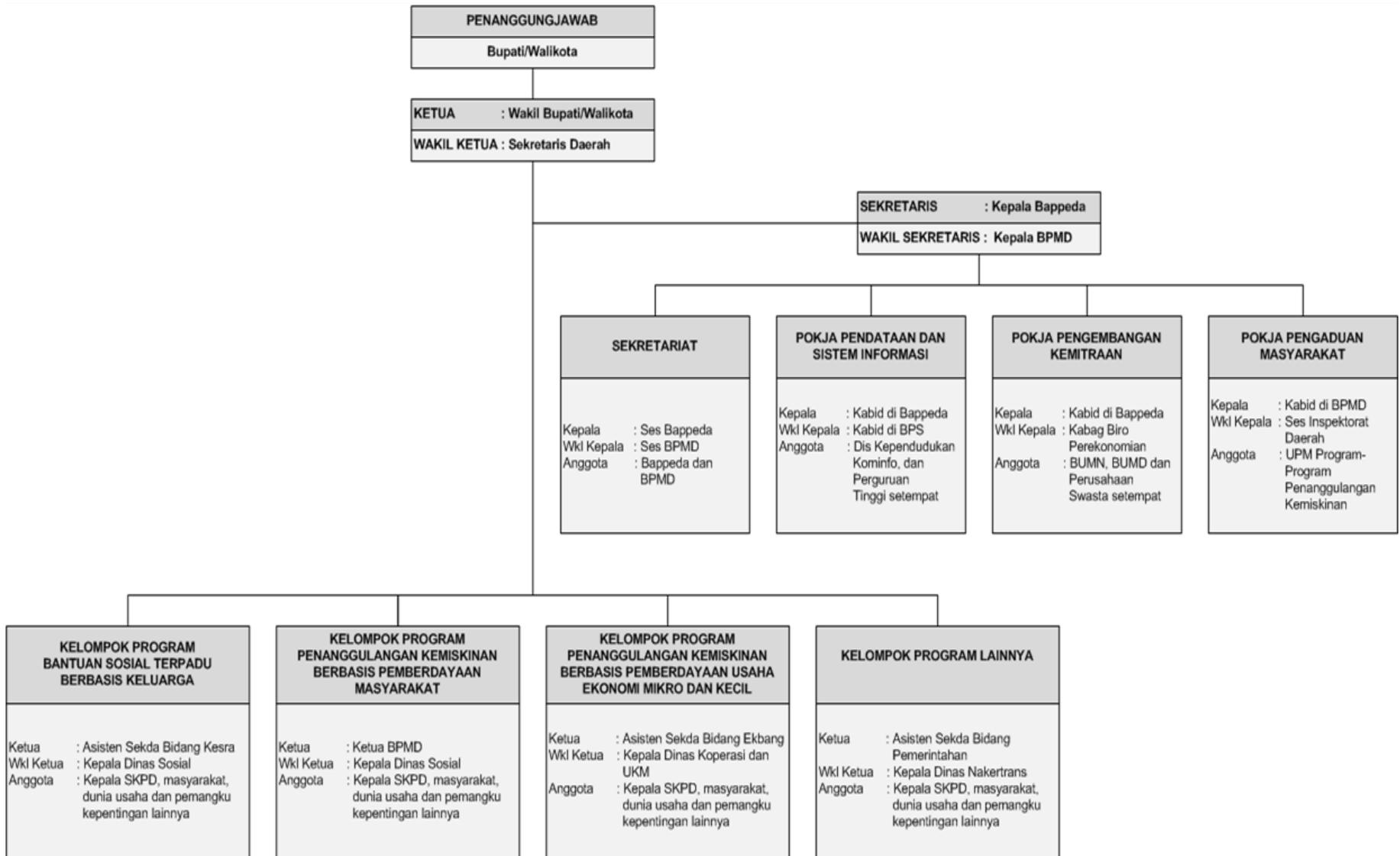
KELEMBAGAAN TKPK KABUPATEN/KOTA

Berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.

- Ketua TKPK Kabupaten/Kota: **Wakil Bupati/Wakil Walikota** yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
- Sekretaris TKPK Kabupaten/Kota: **Kepala Bappeda Kabupaten/Kota** yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
- Keanggotaan TKPK Kabupaten/Kota terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan.
- Penetapan tugas, susunan keanggotaan, kelompok kerja, sekretariat, dan pendanaan TKPK Kabupaten/Kota diatur dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota dengan memperhatikan Perpres 15/2010.

STRUKTUR ORGANISASI

TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TKPK) KABUPATEN/KOTA



APA YANG DIHARAPKAN DARI TKPK DAERAH?

1. TKPKD mampu mendorong proses perencanaan dan penganggaran sehingga menghasilkan anggaran yang efektif untuk penanggulangan kemiskinan.
2. Mampu melakukan koordinasi dan pemantauan program penanggulangan kemiskinan di daerah.

TUGAS TIM TEKNIS TKPK DAERAH

Menyiapkan Agenda Rapat TKPK Daerah yang terdiri dari:

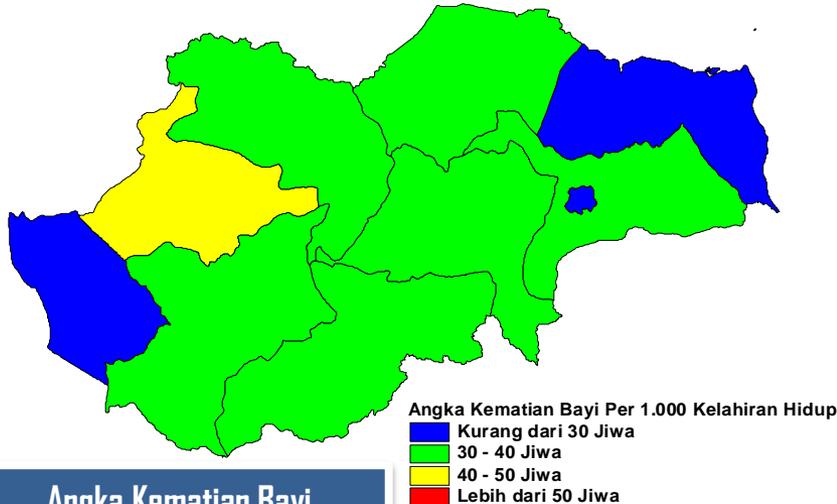
1. Memantau situasi dan kondisi kemiskinan di daerah
2. Menganalisis besaran pengeluaran pemerintah daerah sehingga efektif untuk penanggulangan kemiskinan (APBN dan APBD)
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengendalian program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan di daerah.

MEMANTAU SITUASI DAN KONDISI KEMISKINAN DI DAERAH

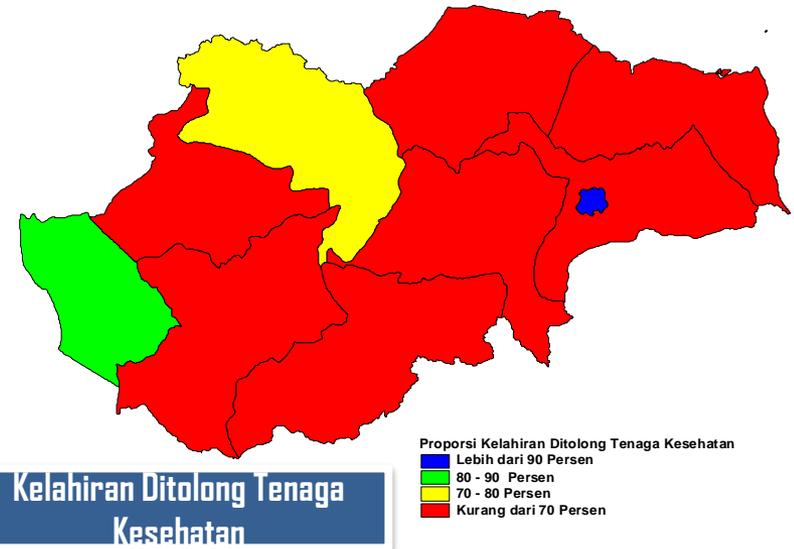
PENENTUAN INDIKATOR

Bidang	Indikator Utama
Kemiskinan dan Ketenagakerjaan	Tingkat Kemiskinan Tingkat Pengangguran
Kesehatan	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Balita Angka Kematian Ibu Melahirkan Prevalensi Balita Kekurangan Gizi
Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar Angka Partisipasi Murni Angka Melek Huruf Angka Putus Sekolah
Infrastruktur Dasar	Akses Sanitasi Layak Akses Air Minum Layak Rasio Elektrifikasi
Ketahanan Pangan	Perkembangan Harga Beras Perkembangan Harga Bahan Kebutuhan Pokok Utama

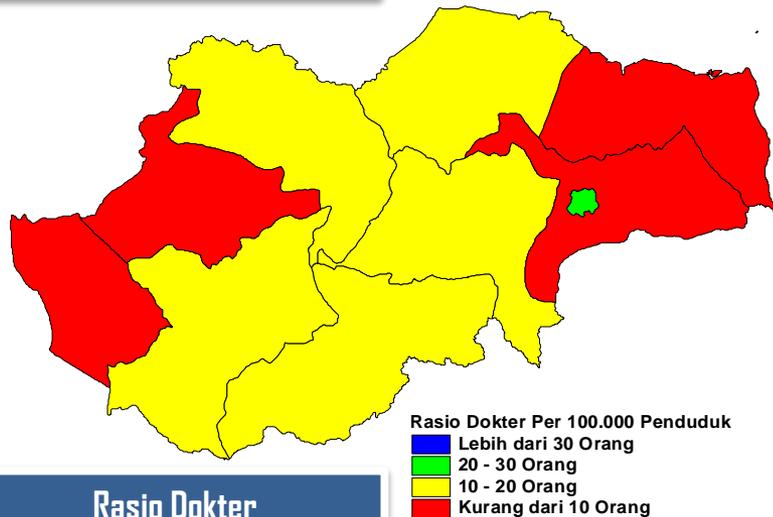
ANGKA KEMATIAN BAYI DAN INDIKATOR PENDUKUNGNYA DI PROVINSI JAMBI



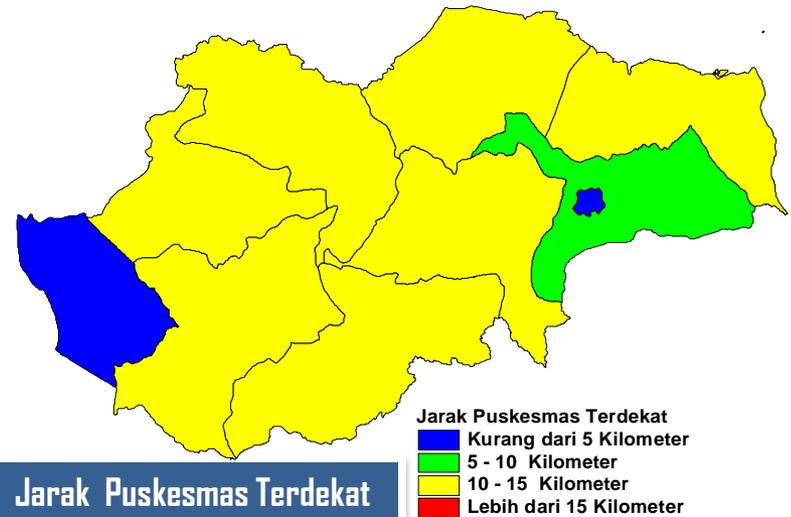
Angka Kematian Bayi



Kelahiran Ditolong Tenaga Kesehatan



Rasio Dokter

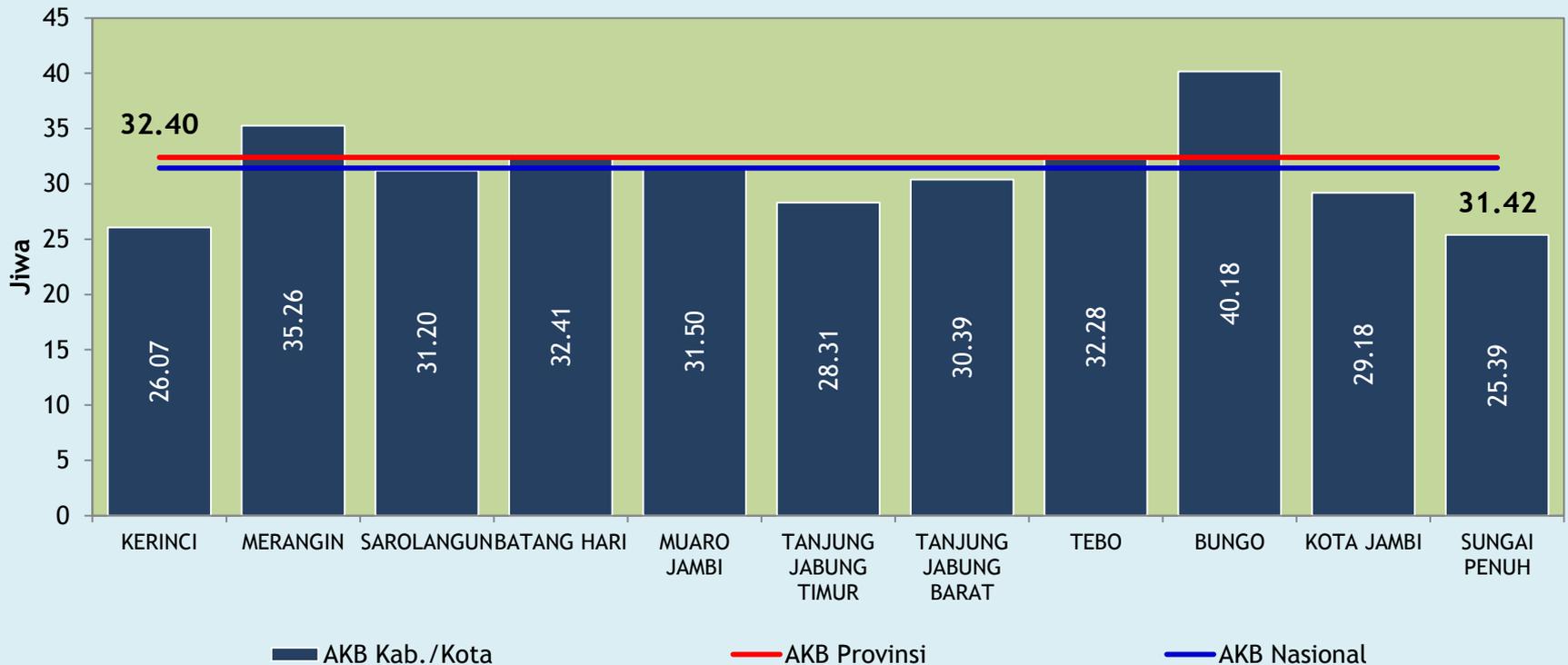


Jarak Puskesmas Terdekat

ANALISIS PERBANDINGAN ANTAR WILAYAH

Contoh Kasus

Perbandingan Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1.000 Kelahiran Hidup Menurut Kabupaten/Kota, Provinsi Jambi Tahun 2009

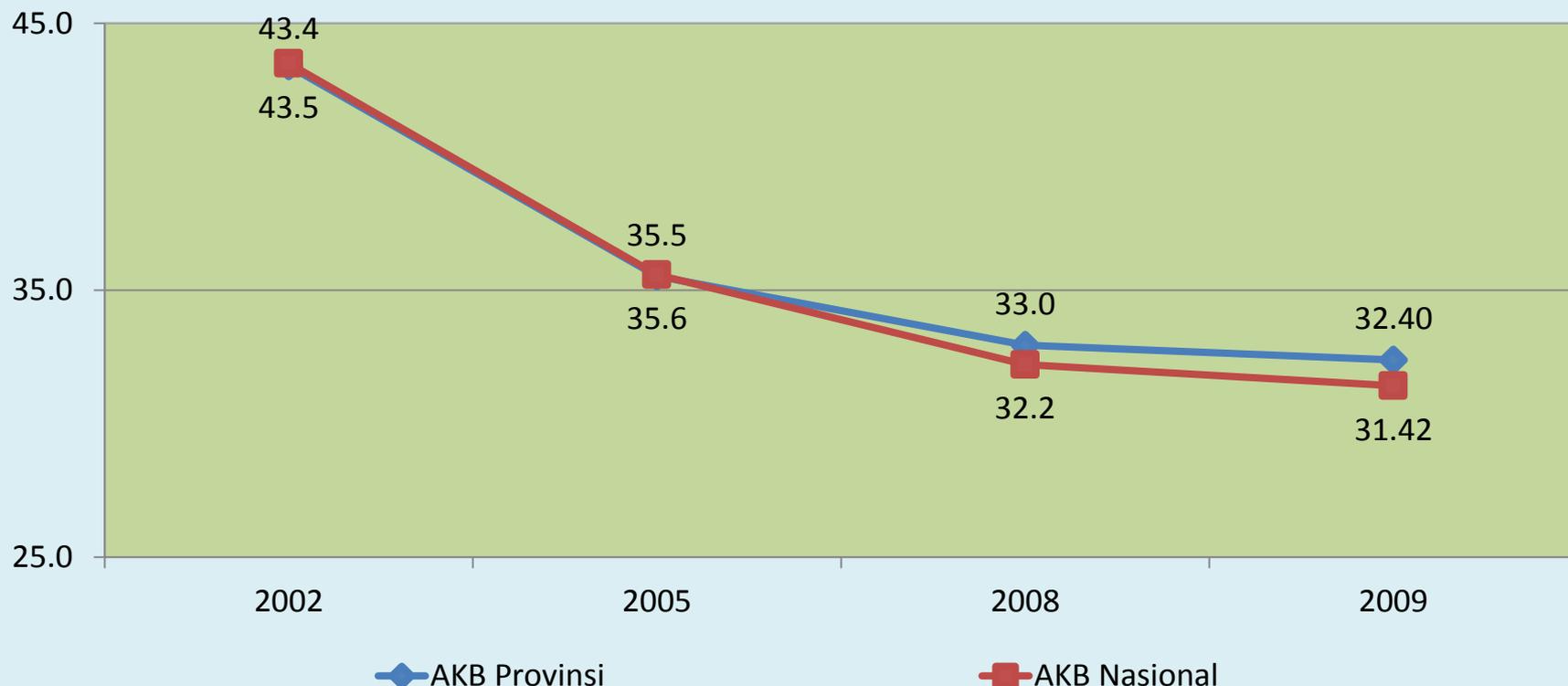


Masih terdapat kesenjangan (disparitas) angka kematian bayi (AKB) antar wilayah di Provinsi Jambi. Beberapa wilayah, perlu memperoleh perhatian dan intervensi untuk menurunkan angka angka kematian bayi (AKB). Wilayah-wilayah tersebut di antaranya: Kabupaten Merangin; Batang Hari, Tebo dan Bungo.

ANALISIS RELEVANSI

Contoh Kasus

Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) Provinsi Jambi,
Tahun 2002 - 2009

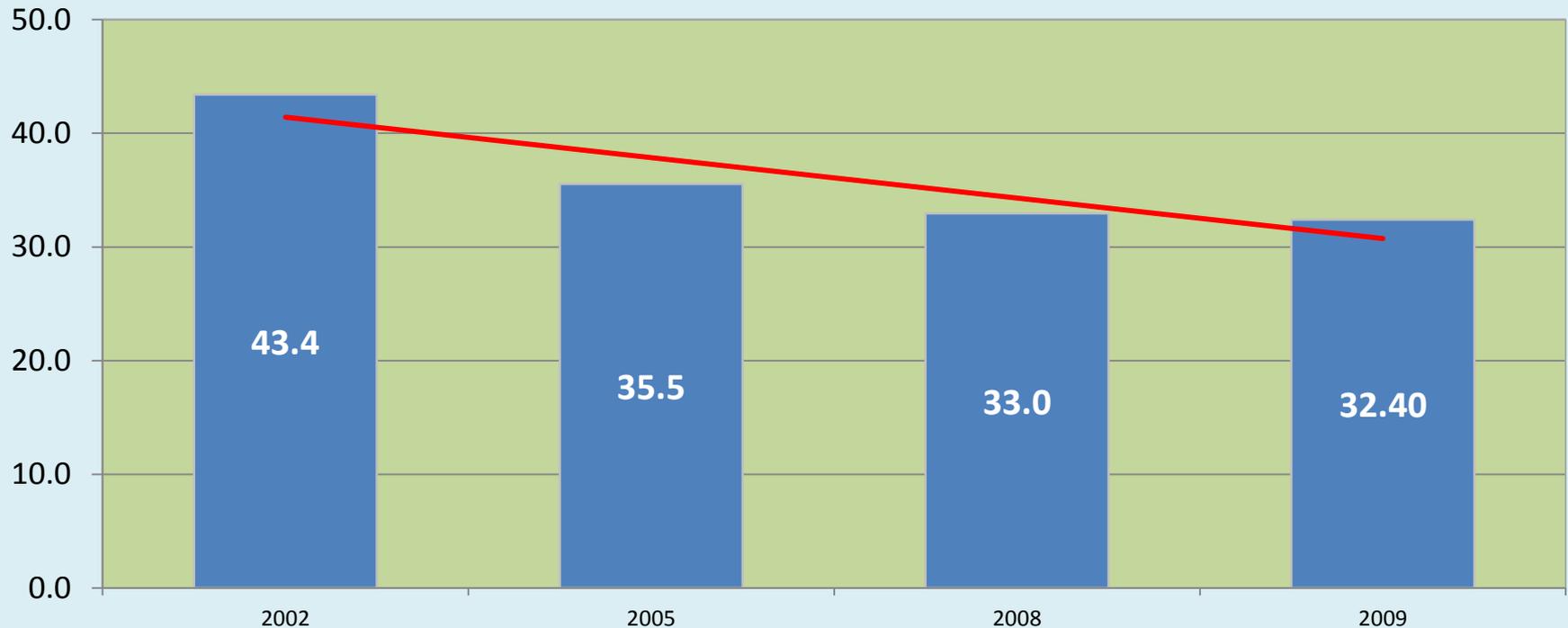


Pada tahun 2002 – 2009, kecenderungan angka kematian bayi (AKB) di Provinsi Jambi sejalan dengan kecenderungan angka kematian bayi (AKB) tingkat nasional. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada periode tersebut upaya penurunan angka kematian bayi di Provinsi Jambi sejalan untuk mendukung tujuan nasional.

ANALISIS EFEKTIVITAS

Contoh Kasus

Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) Provinsi Jambi, Tahun 2002-2009

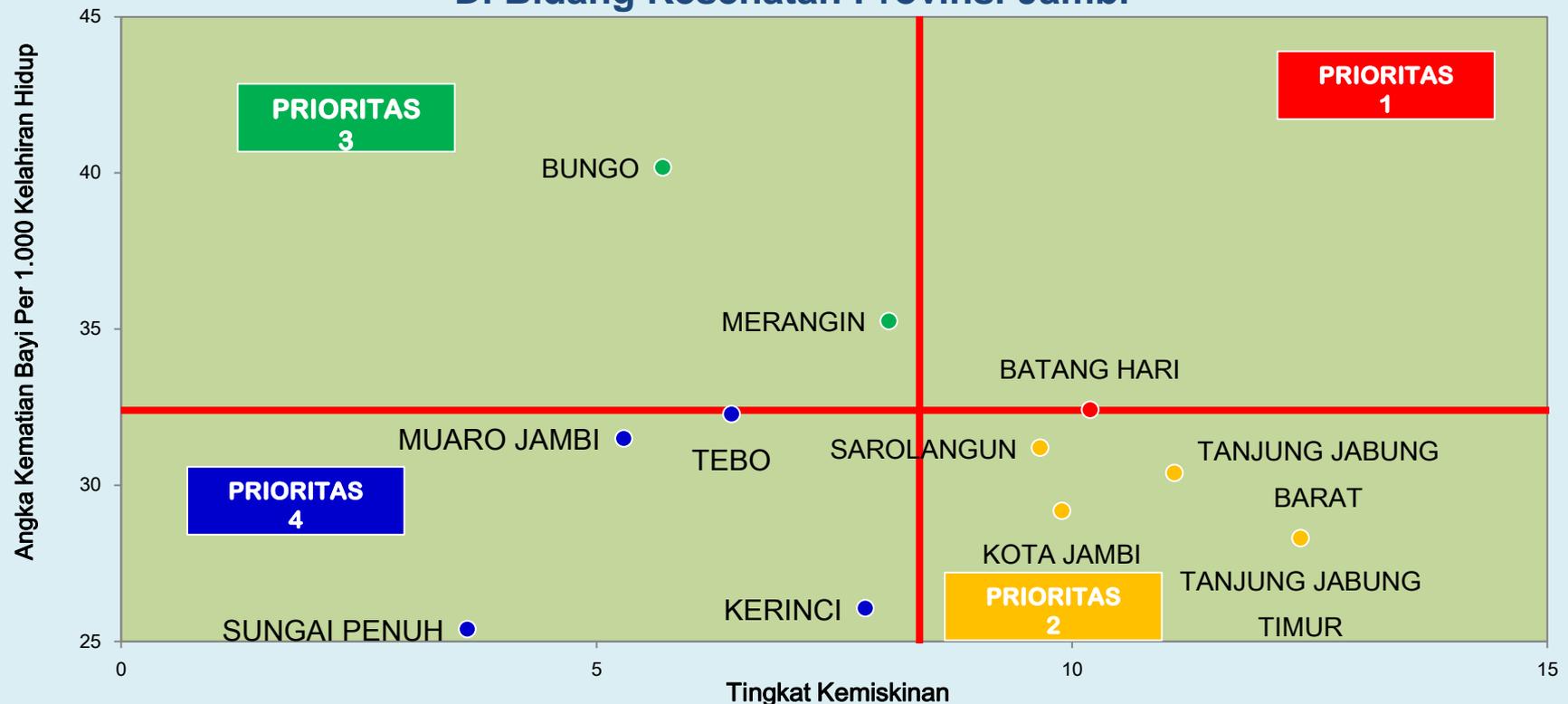


Pada periode tahun 2002-2009, AKB Provinsi Jambi menurun dari 43,4 jiwa/1000 kelahiran hidup menjadi 32,43 jiwa/1000 kelahiran hidup. Dengan demikian, program-program yang mendukung penurunan angka kematian bayi (AKB) di Provinsi Jambi efektif dan berdampak positif terhadap kualitas kesehatan penduduk, khususnya kesehatan bayi.

ANALISIS PENENTUAN WILAYAH PRIORITAS

Contoh Kasus

Penentuan Kabupaten/kota Prioritas Untuk Dilakukan Intervensi Di Bidang Kesehatan Provinsi Jambi



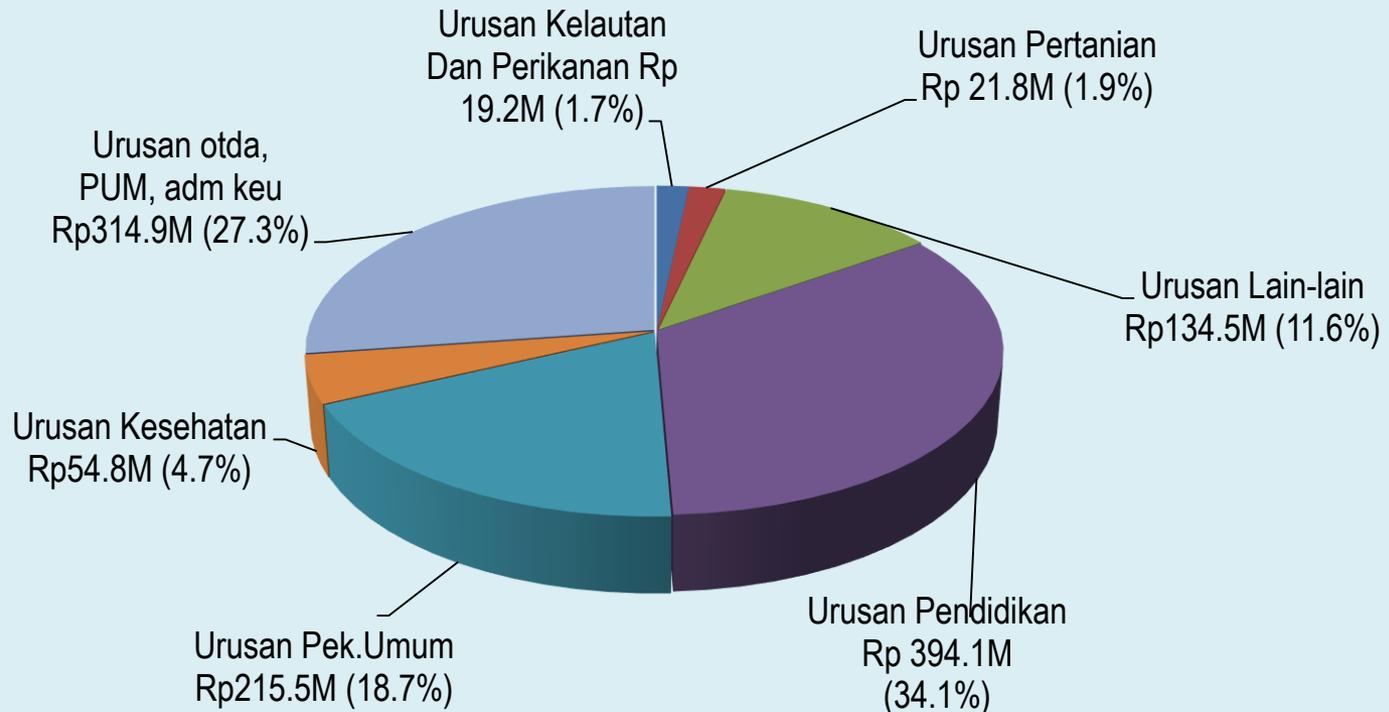
Dengan menggunakan tingkat kemiskinan sebagai target intervensi dan angka kematian bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup sebagai salah satu indikator utama dibidang kesehatan dapat ditentukan wilayah-wilayah yang perlu memperoleh prioritas intervensi. **Prioritas pertama** adalah wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan AKB tinggi, wilayah tersebut adalah: Kabupaten Batang Hari.

ANALISIS BESARAN PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH

ANALISIS ANGGARAN MELIHAT KESESUAIAN ALOKASI DENGAN PRIORITAS

Contoh Kasus

Distribusi Belanja Sektor Terhadap Total Anggaran Kota Surakarta

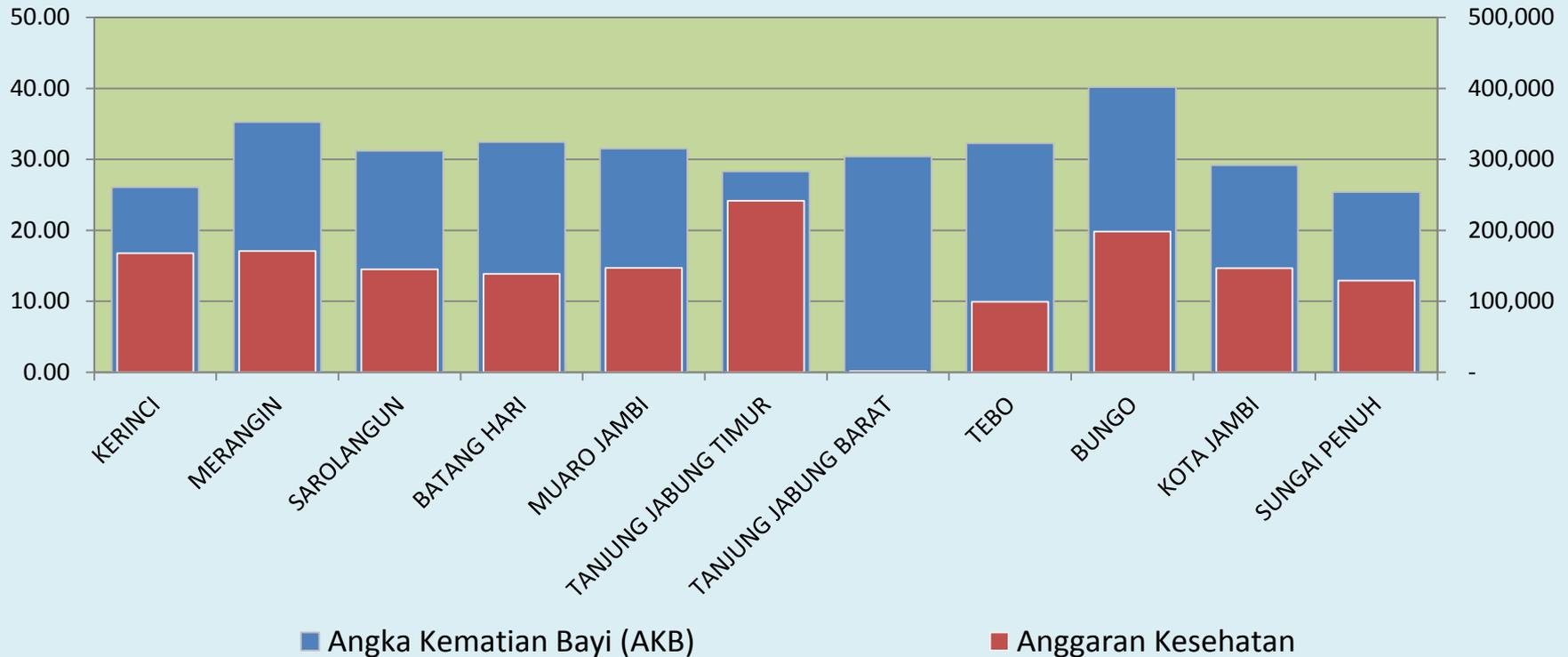


Alokasi anggaran sektor pendidikan paling besar dibandingkan dengan anggaran untuk urusan lainnya. Anggaran yang dialokasikan untuk sektor pendidikan sebesar Rp 394,1 miliar, setara 34.1 persen APBD. Alokasi anggaran tersebut mencerminkan alokasi yang efektif bagi penanggulangan kemiskinan apabila sektor pendidikan merupakan prioritas di Surakarta.

ANALISIS ANGGARAN OLEH PEMERINTAH DAERAH SATU TINGKAT DI ATASNYA UNTUK MELIHAT DISTRIBUSI ANGGARAN

Contoh Kasus

Distribusi Anggaran Bidang Kesehatan dan Permasalahan Angka Kematian Bayi Provinsi Jambi, Tahun 2010



Pengalokasian anggaran tahun 2010 belum sepenuhnya sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Sebagai contoh: Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Tebo merupakan daerah dengan AKB relatif tinggi namun anggaran bidang kesehatan lebih rendah dibandingkan dengan anggaran kesehatan untuk daerah-daerah yang memiliki AKB tinggi lainnya.

CONTOH KASUS ANALISIS DISTRIBUSI ANGGARAN: BIDANG KESEHATAN

Contoh Kasus

Belanja Kesehatan Menurut Jenis Program Kabupaten Ende, Tahun 2009

PROGRAM	TOTAL (RP)	PERSEN
Program Kesehatan Masyarakat	14,997,017,108	21.15%
PR 1.1 KIA	1,789,936,829	2.52%
PR 1.2 Gizi	529,165,600	0.75%
PR 1.3 Immunisasi	250,209,538	0.35%
PR 1.5 Malaria	7,147,062	0.01%
PR 1.6 HIV/AIDS	107,281,285	0.15%
PR 1.7 Penyakit Menular Lain	532,680,000	0.75%
PR 1.9 KB	248,927,050	0.35%
PR 1.10 Usaha Kesehatan Sekolah	38,465,000	0.05%
PR 1.12 Kesehatan Lingkungan	10,649,674,005	15.02%
PR 1.13 Promosi Kesehatan	769,817,416	1.09%
PR 1.14 Penanggulangan Bencana	28,219,238	0.04%
PR 1.15 Surveilans	42,994,085	0.06%
PR 1.16 Program Kesehatan Masyarakat Lainnya	2,500,000	0.00%

PROGRAM	TOTAL (RP)	PERSEN
Program Kesehatan Perorangan	25,069,669,749	35.35%
PR 2.1 Pelayanan Rajal	927,859,101	1.31%
PR 2.2 Pelayanan Ranap	2,159,795,759	3.05%
PR 2.3 Pelayanan Rujukan	4,444,890,100	6.27%
PR 2.4 Pengobatan Umum (tidak jelas masuk PR 2.1- 2.3)	17,537,124,790	24.73%
Program yang Menyangkut Capacity Building/Penunjang	30,855,527,371	43.51%
PR 3.1 Administrasi & Manajemen	15,854,286,995	22.35%
PR 3.3 Capacity Building	1,401,968,343	1.98%
PR 3.4 Pengadaan dan Pemeliharaan Infrastruktur	8,486,541,583	11.97%
PR 3.5 Pengawasan (Monitoring dan Supervisi)	81,240,000	0.11%
PR 3.6 Obat dan Perbekalan Kesehatan	5,014,666,210	7.07%
PR 3.8 Program Capacity Building/Penunjang Lainnya	16,824,240	0.02%
Grand Total	70,922,214,228	100.00%

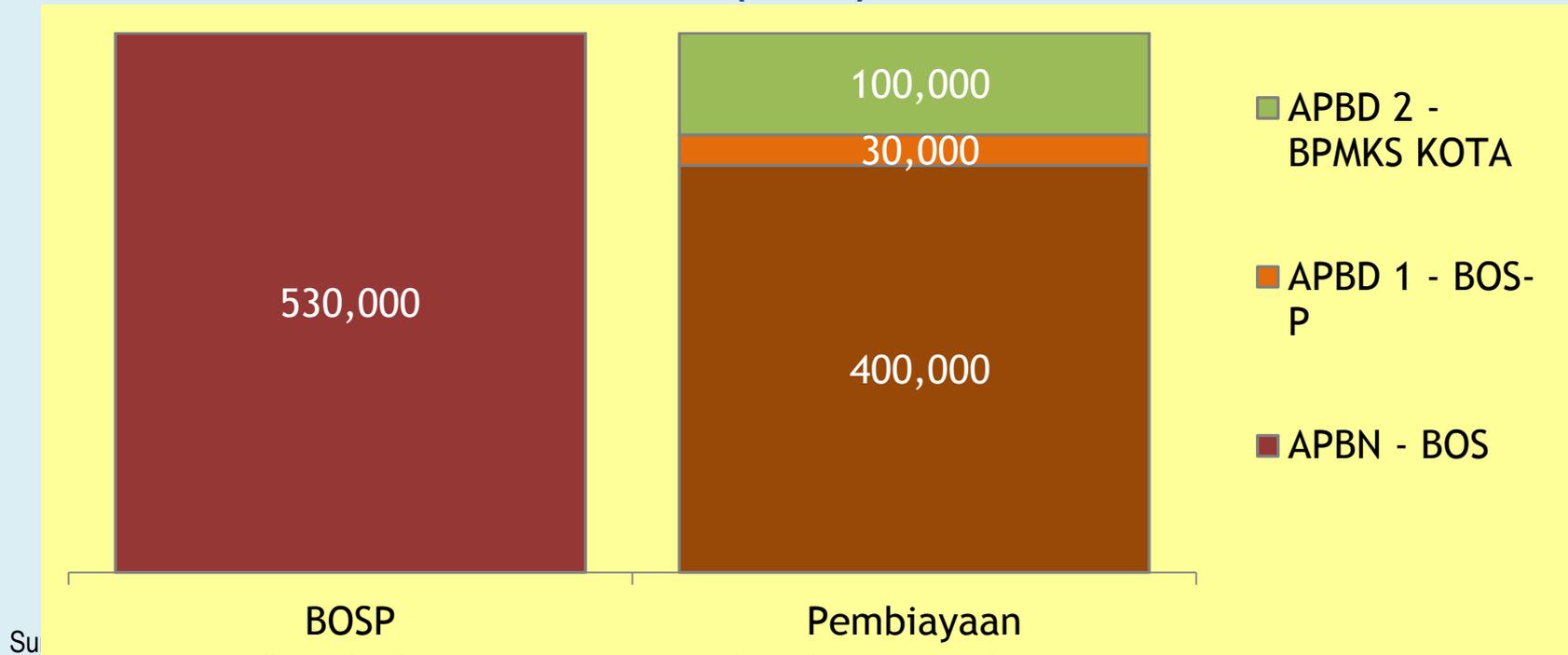
Sumber: Ascobat Gani, 2010

Distribusi anggaran program kesehatan masyarakat lebih kecil dibandingkan dengan anggaran program penunjang dan program kesehatan perorangan. Dari keseluruhan anggaran sektor kesehatan, hanya 21,15 persen yang digunakan untuk program kesehatan masyarakat. Anggaran program kesehatan masyarakat yang relatif lebih kecil berpotensi memperlambat pencapaian sasaran pembangunan dan sasaran pencapaian MDGs, khususnya pada bidang kesehatan.

CONTOH KASUS ANALISIS GAP: BIDANG PENDIDIKAN

Contoh Kasus

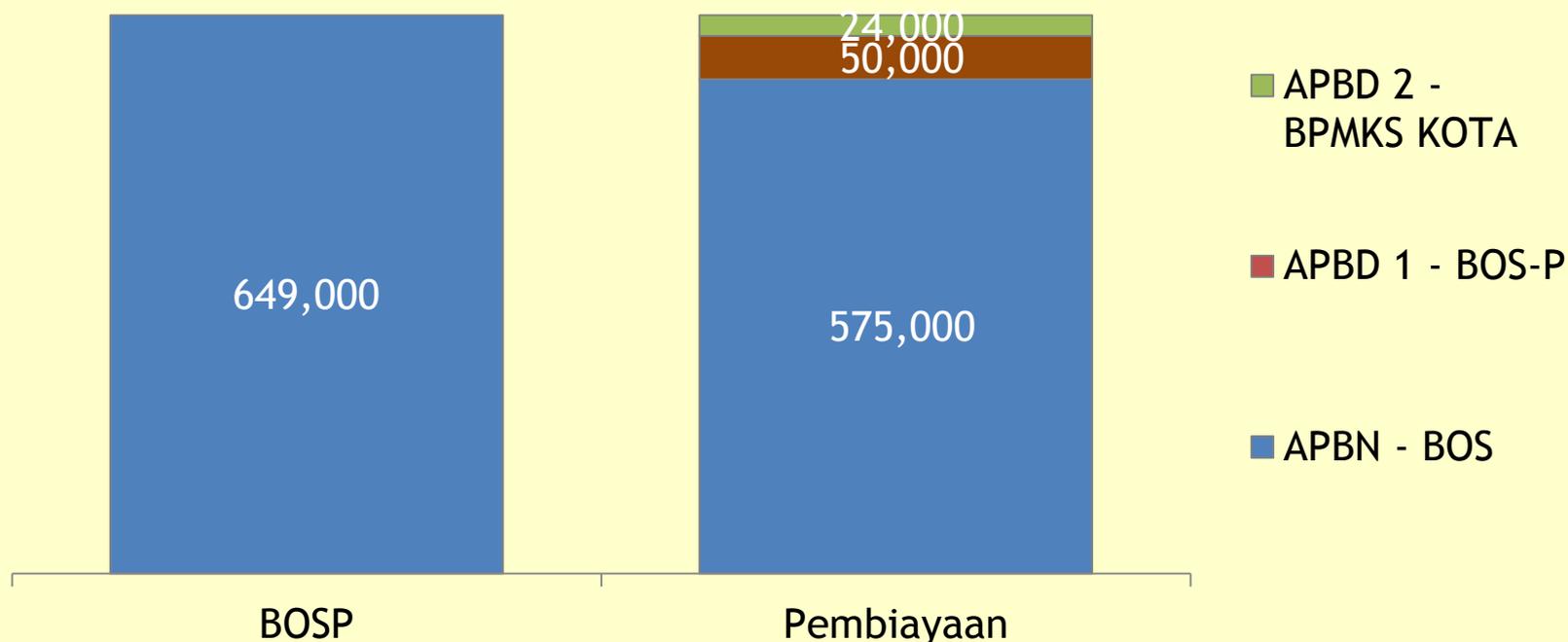
Kebutuhan dan Pemenuhan Biaya Operasional Satuan pendidikan - Jenjang Sekolah Dasar (SD/MI) Kota Surakarta



Hasil perhitungan BOSP untuk SD/MI dengan menggunakan indeks Permendiknas adalah sebesar Rp 530,000 per siswa. Pemerintah pusat melalui alokasi BOS menyediakan sebesar Rp 400.000 per siswa. Sisanya sebesar Rp. 130,000 per siswa harus disediakan oleh pemerintah daerah. Jika Pemerintah Provinsi mengalokasikan Rp. 30.000 per siswa, maka pemerintah kota harus menyediakan Rp. 100,000 per siswa.

Contoh Kasus

Kebutuhan dan Pemenuhan Biaya Operasional Satuan pendidikan - Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs) Kota Surakarta



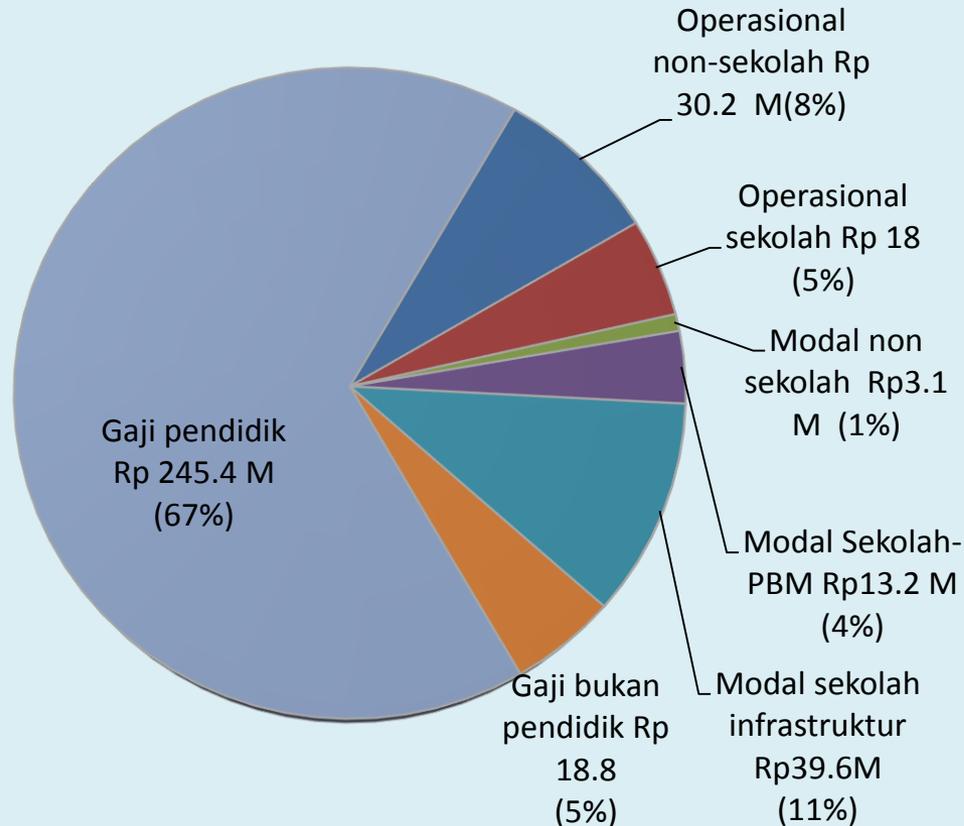
Sumber: Hasil Perhitungan Biaya Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Kota Surakarta, 2010

Hasil perhitungan BOSP untuk SMP/MTS dengan menggunakan indeks Permendiknas adalah sebesar Rp 649,000 per siswa. Pemerintah pusat melalui alokasi BOS menyediakan sebesar Rp 575.000 per siswa. Sisanya sebesar Rp. 74,000 per siswa harus disediakan oleh pemerintah daerah. Jika Pemerintah Provinsi mengalokasikan Rp. 50.000 per siswa, maka pemerintah kota harus menyediakan Rp. 24,000 per siswa.

ANALISIS PERBANDINGAN PROPORSI BELANJA OPERASIONAL SEKOLAH

Contoh Kasus

Perbandingan Proporsi Belanja Operasional Sekolah Kota Surakarta



Belanja operasional gaji pendidik mengambil porsi terbesar dalam belanja sektor pendidikan, sehingga alokasi belanja modal sekolah dan belanja operasional non-gaji menjadi terbatas. Belanja modal sekolah untuk infrastruktur masih relatif kecil mengakibatkan terbatasnya upaya perbaikan infrastruktur sekolah.

ANALISIS SUMBER DAYA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Contoh Kasus

Rasio Siswa/ Guru dan Rasio Rombel/Guru tingkat SD/MI Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2009/2010

Kabupaten	Jumlah Siswa	Jumlah Rombel	Jumlah Guru	Rasio Siswa / Guru	Rasio Rombel / Guru
KEPULAUAN MENTAWAI	12.311	691	505	24,38	0,73
PESISIR SELATAN	61.593	2.007	3.820	16,12	1,90
SOLOK	50.754	2.275	3.739	13,57	1,64
SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG	53.406	1.306	1.872	28,53	1,43
TANAH DATAR	43.094	1.962	2.965	14,53	1,51
PADANG PARIAMAN	61.520	2.691	3.653	16,84	1,36
AGAM	50.657	2.658	3.904	12,98	1,47
LIMA PULUH KOTO	45.536	2.362	3.577	12,73	1,51
PASAMAN	38.921	1.636	2.271	17,14	1,39
SOLOK SELATAN	21.166	959	1.706	12,41	1,78
DHARMASRAYA	24.274	1.066	1.726	14,06	1,62
PASAMAN BARAT	53.423	2.033	3.742	14,28	1,84
KOTA PADANG	97.211	3.126	5.713	17,02	1,83
KOTA SOLOK	7.210	291	600	12,02	2,06

Kabupaten	Jumlah Siswa	Jumlah Rombel	Jumlah Guru	Rasio Siswa / Guru	Rasio Rombel / Guru
KOTA PADANG PANJANG	6.123	219	807	7,59	3,68
KOTA BUKITTINGGI	14.331	600	849	16,88	1,42
KOTA PAYAKUMBUH	14.932	529	904	16,52	1,71
KOTA PARIAMAN	11.037	440	471	23,43	1,07
SUMATERA BARAT	674.306	27.203	43.516	15,50	2,07

Rasio siswa/ guru di Provinsi Sumatera Barat rata-rata adalah 15 orang siswa/guru, lebih rendah dari Standar Nasional Pendidikan sebesar 28 orang siswa/guru maupun Standar Pelayanan Minimum Pendidikan sebesar 32 siswa/guru. Rendahnya rasio siswa/guru menunjukkan adanya kelebihan jumlah guru di Provinsi Sumatera Barat. Rata-rata rasio rombel/guru di Sumatera Barat adalah 2,07. Sementara itu, rasio ideal rombel/guru adalah 1. Tingginya rasio rombel/guru menunjukkan adanya kelebihan guru.

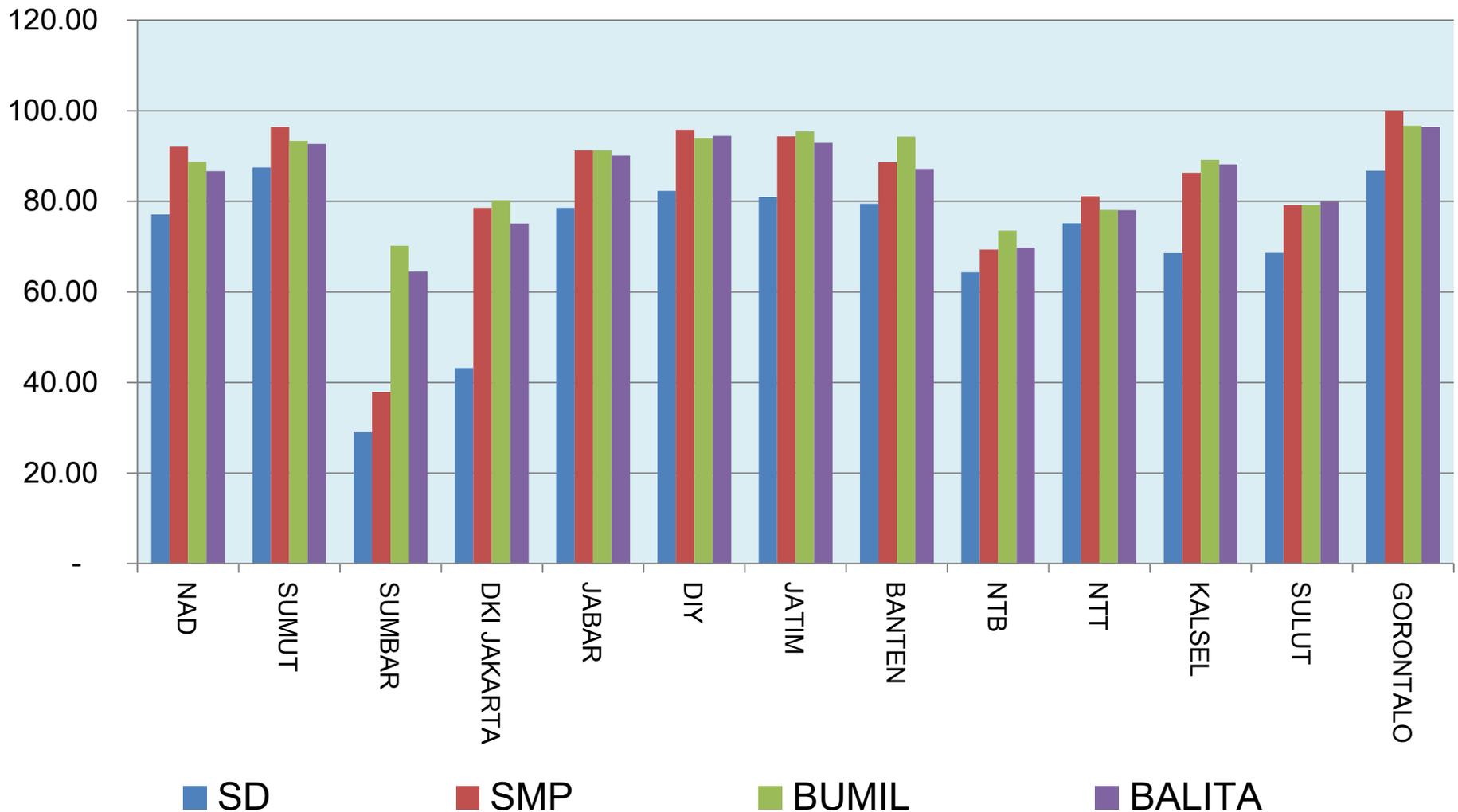
KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PROGRAM-PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN NASIONAL DAN SASARANNYA

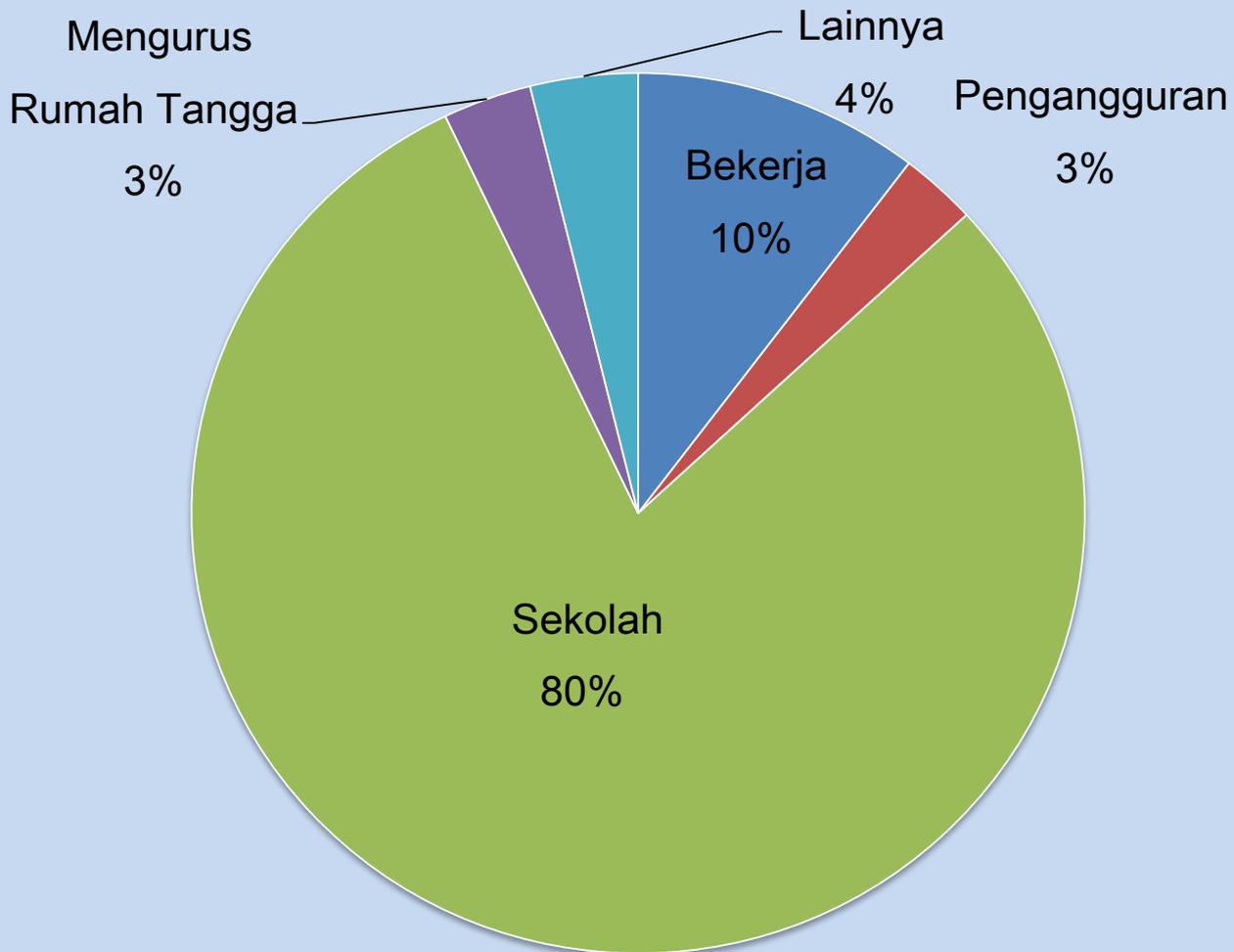
No	Program	Sasaran
1	Program Keluarga Harapan (PKH)	Rumah Tangga Miskin dan Sangat Miskin
2	Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas)	Rumah Tangga Hampir Miskin, Miskin dan Sangat Miskin
3	Program Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin)	Rumah Tangga Miskin dan Sangat Miskin
4	Program Beasiswa Pendidikan untuk Keluarga Miskin	Siswa dari Rumah Tangga Miskin dan Sangat Miskin
	a. Sekolah Dasar (SD/MI)	Siswa SD dari Rumah Tangga Miskin dan Sangat Miskin
	a. Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs)	Siswa SMP/MTs dari Rumah Tangga Miskin dan Sangat Miskin
	a. Sekolah menengah Atas (SMA/MA/SMK)	Siswa SMA/MA/SMK dari Rumah Tangga Miskin dan Sangat Miskin
	a. Pendidikan Tinggi (Diploma dan Sarjana)	Mahasiswa dari Rumah Tangga Miskin dan Sangat Miskin

No	Program	Sasaran
5	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri	Kelompok Masyarakat Umum
	a. PNPM Mandiri Perdesaan	Kelompok Masyarakat Perdesaan
	a. PNPM Mandiri Perkotaan	Kelompok Masyarakat Perkotaan
	a. PNPM Daerah Tertinggal dan Khusus	Kelompok Masyarakat Pedalaman, Tertinggal dan Khusus (Bencana, Konflik dll)
	a. PNPM Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP)	Kelompok Masyarakat Perdesaan
	a. PNPM Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Wilayah (PISEW)	Kelompok Masyarakat Perdesaan
	a. PNPM Peningkatan Usaha Agrobisnis Pertanian (PUAP)	Kelompok Masyarakat Pertanian Perdesaan
	a. PNPM Kelautan dan Perikanan (KP)	Kelompok Masyarakat Pesisir dan Pelaut
	a. PNPM Pariwisata	Kelompok Masyarakat Perdesaan Potensial
	a. PNPM Generasi	Kelompok Masyarakat Perdesaan
	a. PNPM Green <i>Kecamatan Development Program</i> (G-KDP)	Kelompok Masyarakat Perdesaan
	a. PNPM Neighbourhood Development (ND)	Kelompok Masyarakat Perkotaan
6	Program Kredit Usaha Rakyat (KUR)	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

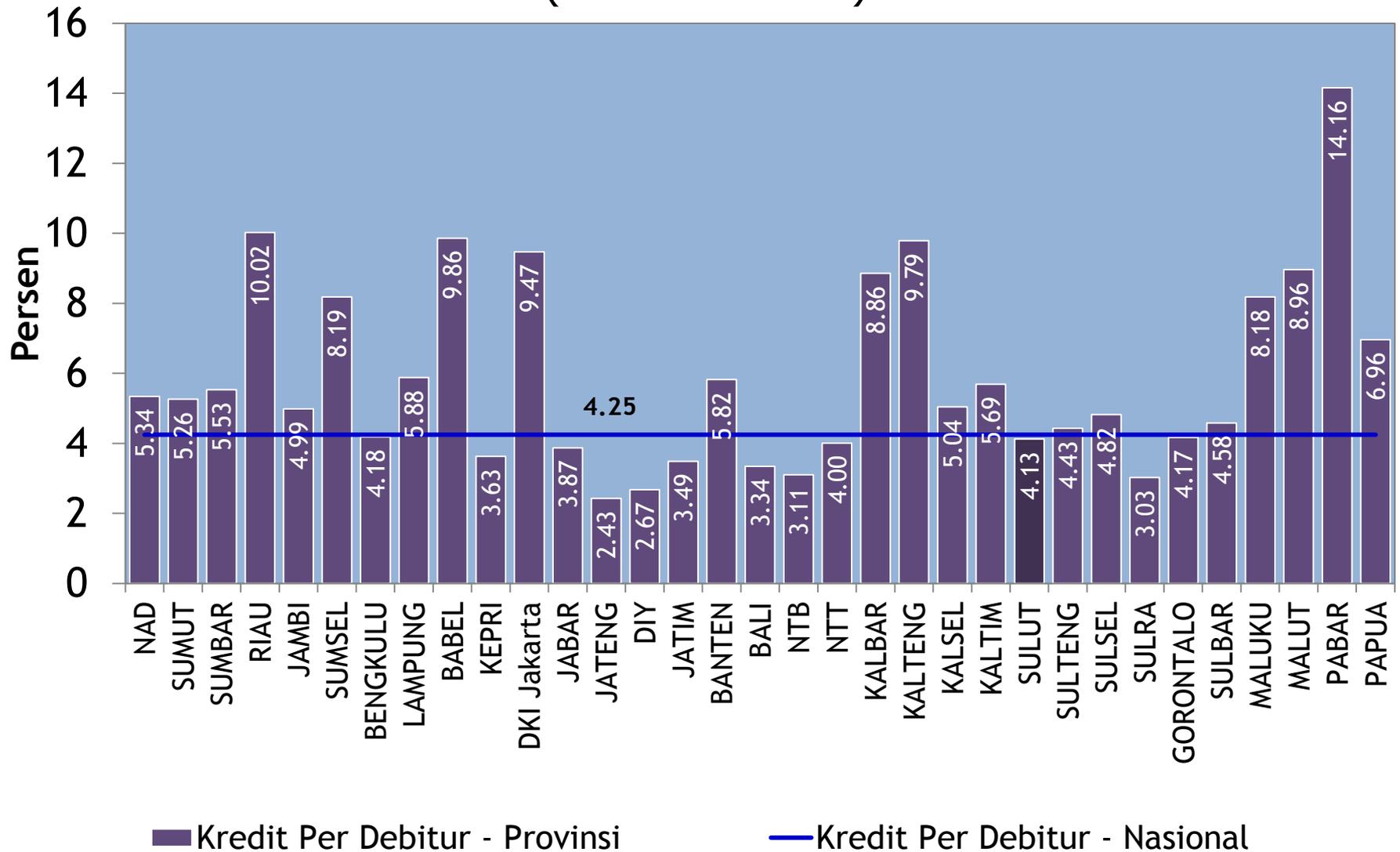
Perbandingan Pencapaian Proses Verifikasi Program Keluarga Harapan (PKH) Menurut Provinsi, Tahun 2010



Persentase Anak Berumur 10-17 Tahun Menurut Jenis Kegiatan, 2009



Jumlah Kredit Per-Debitur Menurut Provinsi (Desember 2010)



TERIMA KASIH